



Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial

Sutrisno^{✉1}, Sapriya^{✉2}, Kokom Komalasari^{✉3}, Rahmat^{✉4}

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima Mei 2021 Revisi Juni 2021 Dipublikasikan Juli 2021</p> <hr/> <p>Keywords : <i>Covid-19,</i> <i>Millennial Generation,</i> <i>Pancasila.</i></p> <hr/> <p>How to Cite : Sutrisno, Sapriya, Kokom Komalasari, Rahmat. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 6(2), pp.25-34. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp43-54</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan global sebagai resolusi konflik sosial. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari artikel ilmiah, laporan penelitian atau hal-hal lain yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan global selalu berorientasi pada upaya dan peran warga negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Konflik sosial di era global saat ini terjadi bukan hanya karena konflik internal antar masyarakat tetapi juga karena pengaruh globalisasi sehingga perlu dilakukan upaya yang strategis dan sistematis dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut diantaranya melalui pembelajaran pendidikan berbasis resolusi konflik online, sekolah pendidikan perdamaian berbasis, mediasi rekan sebagai bentuk resolusi konflik sosial..</p> <hr/> <p>ABSTRACT <i>Global Citizenship Education as Social Conflict Resolution. The purpose of this research is to explain the practice of the values contained in Pancasila, which consists of the value of One Godhead, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy led by Wisdom in Representative Consultations and the value of Social Justice for all Indonesian people. among the millennial generation of Civil Servants in the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta, in the face of the Covid-19 pandemic. Civil Servants who are the population in this study are alumni of basic training for Civil Servant Candidates (CPNS latsar) in 2019. This study uses quantitative descriptive analysis with a single variable, namely the implementation of Pancasila values. Data collected using google form. The results showed that the practice of the practical value of Pancasila among the millennial generation of civil servants of the DKI Jakarta Provincial Government was very good, this is reflected in the average presentation results of the implementation of Pancasila values of 96%. Based on the results of the research that has been done, it is hoped that it can become a source of data regarding the level of practicing Pancasila values in state life among the millennial generation of Civil Servants of DKI Jakarta Province.</i></p>
<p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Pendidikan Indonesia¹, Universitas Pendidikan Indonesia^{2,3,4}</p> <hr/> <p>✉ E-mail: Surisno@umpo.ac.id¹, sapriya@upi.edu², kokom@upi.edu³, rahmat@upi.edu⁴</p>	
DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp43-54	email: jpk@umpo.ac.id

Copyright © 2021 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Perkembangan arus globalisasi memasuki abad ke-21 memberi pengaruh besar pada setiap lini kehidupan manusia salah satunya yakni pada dimensi teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi

menjadi komponen utama dalam arus globalisasi yang terjadi di dunia. Adanya perkembangan teknologi dan informasi selain mempermudah dalam upaya meningkatkan pembangunan negara di berbagai sektor juga dapat berdampak pada

munculnya berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Hal ini menjadi sumber masalah utama yang terjadi khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia

Sebagaimana yang disampaikan oleh Cogan (1999: 7) bahwa memasuki paruh awal abad ke-21 ada tiga permasalahan global terjadi pada setiap negara di dunia yakni 1) berkembangnya ekonomi global, 2) semakin pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi, dan 3) meningkatnya populasi penduduk dunia yang diikuti dengan munculnya permasalahan lingkungan. Masalah ini tentu menjadi dasar bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi saat ini. Sebagaimana hasil observasi yang terjadi di lapangan juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi menjadi pemicu munculnya permasalahan-permasalahan sosial misalnya masih banyaknya berita-berita hoax yang berujung pada konflik sosial, konflik antar elit politik yang berdampak pada konflik sosial di masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di hadapan kepada para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Kepolisian Republik Indonesia 2018 bahwa perkembangan teknologi bisa berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu menimbulkan konflik. (Liputan6.com, 2018)

Bentuk konflik sosial yang terjadi lainnya ialah maraknya kritik antara politik di lingkungan masyarakat yang memihak antar kubu politik dalam pemerintahan hingga berdampak pada konflik sosial di kalangan masyarakat. Apabila hal ini terus terjadi maka dalam proses sistem demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Orientasi masyarakat yang saling acuh tak acuh dalam menyingkapi masalah sosial juga akan menjadi pemicu semakin banyaknya konflik sosial yang akan terjadi. Berdasarkan isu/pola konflik sosial. Pada rentang waktu 2013-2015 (pertengahan kuartal Januari s/d April) telah terjadi total 201 kasus dengan rincian sebagai berikut (1) bentrok antar warga total berjumlah 85 kasus, (2) isu keamanan total berjumlah 45 kasus, (3) isu

SARA total berjumlah 10 kasus, (4) konflik kesenjangan sosial total berjumlah 2 kasus, (5) konflik pada institusi pendidikan total berjumlah 3 kasus (6) konflik ORMAS total berjumlah 10 kasus, (7) sengketa lahan total berjumlah 31 kasus, (8) eksekusi politik total berjumlah 15 kasus. (Web Gurupkn.com, 2016)

Dari data tersebut menggambarkan bahwa konflik sosial menjadi masalah utama di era globalisasi saat ini tentu harus dilakukan upaya yang strategis dan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya persoalannya konflik sosial. Secara umum pemerintah menggambarkan adanya konflik sosial sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dimaksud dengan konflik sosial atau konflik, adalah :

“perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.

Penyelesaian konflik sosial tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun upaya resolusi konflik juga perlu dilakukan di lingkungan sekolah. Salah satu bentuk pendidikan resolusi konflik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah yakni dengan konsep Pendidikan kewarganegaraan global. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah baik sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada pengembangan karakter kepribadian yang berorientasi pada nilai-nilai dasar negara dan falsafah bangsa dengan konsep berwawasan global dapat memberikan penanaman dasar bagi peserta didik dalam memahami setiap konflik.

Pendidikan kewarganegaraan global berorientasi pada tiga dimensi yang meliputi tanggung jawab sosial, kompetensi global dan keterlibatan masyarakat secara global (Duarte B. Morais & Anthony C. Ogden, 2011). Ketiga dimensi ini di aktualisasi kan dalam bentuk pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Pendidikan kewarganegaraan global memberikan dasar nilai moral kemasyarakatan dalam menyelesaikan setiap persoalan atau konflik sosial yang terjadi.

Maka dari itu Pendidikan kewarganegaraan global memiliki beberapa peran baik aktif ataupun partisipatif. Peran guru, pembuat kebijakan, perancang kurikulum, pejabat pemerintah orang tua bahkan peserta didik harus saling berpartisipasi dalam bentuk studi tematik (David Kerr, 1999). Dengan demikian perlu adanya formula yang efektif dan sistematis dalam proses pembekalan ilmu pengetahuan tentang resolusi konflik bagi peserta didik dalam menyingkapi setiap permasalahan sosial yang terjadi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena penulis ingin mendeskripsikan teori dan temuan dari pencarian literatur yang berhubungan dengan resolusi konflik sosial dan pendidikan kewarganegaraan global. Kajian dari literatur yang dipakai pada artikel ini di dapat dengan mencari dari beberapa literatur baik jurnal Internasional maupun jurnal nasional terakreditasi, buku dan E-Book. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey langsung maupun dari literatur.

Penelitian studi literatur ini menggunakan metode pendekatan 1) Inventarisasi Literatur yakni mengumpulkan berbagai literatur yang akan diteliti dan literatur penunjang terkait dengan literatur yang akan diteliti, 2) Deskripsi Literatur yakni menyusun daftar literatur yang hendak kita teliti, dan literatur

pun telah tersedia untuk dibaca, barulah membuat uraian atau deskripsi tiap-tiap literatur secara terperinci, 3) Perbandingan literatur perlu dilakukan, apabila sebuah cerita ditulis dalam dua literatur atau lebih untuk membetulkan kata-kata yang salah atau tidak terbaca; untuk menentukan silsilah literatur; untuk mendapatkan literatur yang terbaik; dan untuk tujuan-tujuan lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari suatu data mengenai beberapa hal yang dapat berupa catatan, buku, artikel, media massa, dan beberapa sumber bacaan lainnya yang dapat diterima kebenarannya berdasarkan kajian ilmiah yang ada. Penelitian ini menggunakan dua model penelaahan atau analisis terhadap kajian yang dilakukan. Analisis deduktif dilakukan berdasarkan teori-teori atau konsep umum yang ada dan relevan serta analisis induktif yang dilakukan berdasarkan sintesis penelitian sebelumnya. Pada konteks ini, peneliti mengkaji tentang konsep bagaimana konsep Pendidikan kewarganegaraan global digunakan sebagai resolusi konflik sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang lingkup pendidikan harus bersumber pada nilai dasar kearifan lokal sebagai bagian dari pengembangan identitas nasional di era global. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 harus terintegrasi dalam lingkup identitas nasional dan juga berorientasi pada nilai-nilai dasar filosofis bangsa. Konsep pendidikan abad 21 di kembangkan dalam berbagai nilai dasar yang berorientasi pada pengembangan kecakapan warga negara abad 21. Pendidikan kecakapan warga negara abad ke-21 menjadi alternatif dalam membentuk karakter warga negara yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara global yang berdampak pada munculnya konflik sosial di lingkungan masyarakat. Bentuk pendidikan yang dapat diajarkan dalam proses penyelesaian

masalah-masalah global saat ini adalah melalui pemahaman akan nilai-nilai wawasan global pada generasi muda yang diorientasikan pada nilai jati diri bangsa dalam hal ini berupa Pendidikan kewarganegaraan global.

Untuk membangun konsep warga negara yang berorientasi pada nilai-nilai dasar kehidupan sosial kemasyarakatan yang dapat menjadi landasan dasar dalam penyelesaian konflik sosial maka konsep pendidikan resolusi konflik yang berorientasi pada wawasan global harus dikembangkan dalam lingkup pembelajaran di kelas.

Resolusi konflik sosial yang dikembangkan dalam ranah pendidikan kewarganegaraan global memiliki indikator pencapaian dimensi sosial kultur masyarakat yang bersumber pada tanggung jawab sosial, kompetensi global dan keterlibatan masyarakat secara global (Duarte B. Morais & Anthony C. Ogden, 2011). Dimensi ini kemudian direkonstruksikan pada nilai-nilai dasar wawasan global warga negara Indonesia yang terdiri dari pencapaian dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kompetisi, menghormati orang lain, kemerdekaan, perdamaian. (Murdiono, 2014: 356).

Dengan demikian konsep pembelajaran pendidikan kewarganegaraan global menjadi alternatif dalam menyelesaikan atau memberikan resolusi konflik sosial di masyarakat yang diakibatkan dari perkembangan teknologi dan informasi di era digital. Adapun model pendekatan yang bisa dilakukan melalui pendekatan pembelajaran pendidikan resolusi konflik berbasis online, pendidikan perdamaian berbasis sekolah, serta mediasi sebaya sebagai bentuk resolusi konflik sosial

Pendidikan Kewarganegaraan Global

Pendidikan menjadi dasar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. melalui sistem pendidikan yang berkualitas akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan bangsa dan negara di era global. Dinamika global tentu tidak bisa

dilepaskan dari pengaruh pemerintah dalam menyiapkan warga negara dalam memasuki era revolusi industri 4.0. semakin tinggi tingkat pendidikan dan berkualitas tentu berpengaruh pada laju pertumbuhan dan pembangunan bangsa. Namun demikian rendahnya tingkat pendidikan di era global juga berdampak pada maraknya konflik sosial di kalangan masyarakat. karena penanaman nilai-nilai moral kemasyarakatan masih rendah. Maka dari itu kualitas pendidikan menjadi objek utama untuk di perbaiki guna menyiapkan generasi muda yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai moral falsafah bangsa.

Wawasan global merupakan kajian yang dikembangkan dalam proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai global warga negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari warga negara global. Konsep warga negara global Menurut Beth salah seorang guru studi sosial di Hickory High School (dalam Dill, Jeffrey S, 2012) mengungkapkan bahwa warga negara global adalah seseorang yang berakar dalam identitas kebangsaan nya, tetapi mereka memiliki kesadaran yang lebih besar dari pada itu yakni menghargai berbagai keberagaman budaya-budaya, sikap toleransi terhadap keyakinan dan kepercayaan lain serta melihat berbagai isu-isu global sebagai kajian utama dari pada batas-batasan bangsanya sendiri. Konsep warga negara global memberikan gambaran bahwa manusia dalam menjalankan kehidupan harus berorientasi pada dasar nilai kehidupan secara global yang senantiasa menjunjung nilai-nilai kebersamaan, kemanusiaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara bangsa dalam menyelesaikan setiap permasalahan konflik sosial. Sebagaimana yang disampaikan Bringham (dalam Zahabioum, Yousefy, Yarmohammadian, Keshtiaray, 2012) menyatakan bahwa, *“global citizenship is A way of understanding - how the world works, links between our own lives and those of people throughout the*

world". Kewarganegaraan global membahas tentang peran dan tanggung jawab manusia dalam memahami, melihat dan bertindak dalam kondisi dunia kerja, serta hubungan antar kehidupan manusia secara individu dan warga negara di seluruh dunia.

Aktualisasi konsep kewarganegaraan global dapat dikembangkan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah yang berorientasi pada wawasan global warga negara. pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dalam membentuk karakter wawasan global warga negara. pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib di sekolah yang berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter namun demikian pendidikan kewarganegaraan juga memiliki fungsi untuk dapat mempersiapkan warga negara menjadi warga global. melalui pendidikan kewarganegaraan peserta didik dibekali dengan berbagai kemampuan dasar dalam menganalisis pengetahuan tentang isu-isu global, budaya dan lembaga internasional dalam membangun interaksi antar negara dalam menyelesaikan dan mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan global. sebagaimana yang disampaikan oleh Bourke, Bamber & Lyons (2012:163) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mencerminkan pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan peserta didik siap untuk mengambil peran sebagai warga global dewasa dan bertanggung jawab. Warga negara.

Pendidikan kewarganegaraan global perlu untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Agbaria (2011: 61-62) menyampaikan bahwa perlu adanya pemahaman akan pendidikan kewarganegaraan global bagi peserta didik hal ini guna memberikan wawasan global warga negara di era globalisasi. Hal ini mengingat bahwa memasuki era globalisasi generasi muda akan mengalami berbagai konflik sosial akibat dari adanya

perkembangan teknologi dan informasi. Konflik sosial tidak hanya terjadi akibat dari adanya perbedaan dalam etnis, bahasa, ras, sosial ekonomi, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, ledakan penduduk dan maraknya informasi hoax yang dapat memicu adanya konflik sosial.

Pendidikan kewarganegaraan global memiliki tiga indikator yang dikembangkan dalam proses pembelajaran sebagaimana yang disampaikan oleh Duarte B. Morais & Anthony C. Ogden (2011) yakni tanggung jawab sosial, kompetensi global dan keterlibatan masyarakat secara global. Indikator ini menjadi dasar dalam membentuk karakter wawasan warga negara global dalam menyelesaikan permasalahan global. Menurut Mukhamad Murdiono (2014: 352) Untuk membangun wawasan global warga negara muda, pendidikan kewarganegaraan harus menekankan pada bentuk pengembangan peserta didik agar memiliki sikap dan kemauan melakukan interaksi dengan sesama manusia yang berdasar pada prinsip menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia Pengembangan nilai dasar pendidikan kewarganegaraan selain menekankan aspek pengetahuan, nilai, dan sikap juga harus menumbuhkan rasa hormat dan empati yang bersifat global, di luar batas bangsa dan negara. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan global dapat menjadi alternatif dalam penanaman nilai-nilai moral karakter bangsa sebagai bentuk upaya resolusi konflik sosial dari adanya pengaruh globalisasi.

Resolusi Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan masalah yang sering dialami setiap bangsa negara dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat dengan tingkat keragaman tinggi. Begitupun di negara Indonesia berbagai permasalahan di Indonesia semakin menjadi permasalahan yang sering terjadi di Negara Indonesia. Secara umum konflik adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Konflik bisa diawali dari konflik antar individu, konflik keluarga, konflik kelompok, hingga konflik

antar penguasa perbedaan pandangan politik serta konflik dari pengaruh perkembangan teknologi dan informasi di era global. Bayak pakar politik yang mendefinisikan pemahaman tentang resolusi konflik.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman budaya atau multikultural yang tinggi. Multikultural bangsa Indonesia menjadikan banyak konflik sosial yang muncul dan terjadi. Jika dilihat dari nilai sosial dan agama, Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan penuh kedamaian sebagai refleksi dari nilai-nilai agama yang dianutnya. Sebab, semua agama hakikatnya mengajarkan umatnya untuk kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan masyarakat, serta sepakat dalam menghargai perbedaan-perbedaan sebagai realitas kemajemukan yang terformulasi dalam Sumpah Pemuda, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apapun akar masalahnya dalam suatu konflik sosial pada hakikatnya tetap merugikan semua pihak, terutama kalangan masyarakat bawah sehingga yang dibutuhkan adalah revitalisasi dan proses transformasi nilai dengan lebih mengedepankan hal-hal berikut. (1) Pemahaman fungsional agama dan pendekatan yang rasional dan sehingga nuansa agama menyatu dengan kehidupan, termasuk di dalamnya transformasi nilai agama, penafsiran, dan reaktualisasi sesuai dengan perkembangan masyarakat agar agama tetap dirasakan manfaatnya dan berfungsi dalam kehidupan. (2) Nilai-nilai luhur bangsa, kesadaran atas kemajemukan, dan perlunya sikap inklusif dalam beragama adalah nilai-nilai dasar yang harus dibangun secara sistematis lewat pencerdasan pendidikan dan pembelajaran yang humanis. (Sagaf S. Pettalongi, 2013)

Dampak globalisasi secara umum menjadikan masyarakat cenderung memunculkan konflik sosial di kalangan masyarakat. Globalisasi tentu tidak bisa dihindari namun harus disiapkan agar pemicu adanya konflik sosial dari globalisasi yang salah satunya dari teknologi dan informasi bisa diminimalisir. Menurut Rothman dalam

Jurdi (2010: 268) menyampaikan bahwa agar konflik dapat diminimalisir pada kalangan masyarakat maka perlu dilakukan beberapa tindakan diantaranya adalah (1) Tindakan koersif (paksaan), serta perlu ada pengaturan administrative, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi. (2) Memberikan insentif seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan keharmonisan. (3) Tindakan persuasive terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik dan ekonomi. (4) Tindakan normatif yakni melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang berlaku. Hal ini tentu harus dilakukan secara sistematis yang dimulai dari peran pemerintah dalam bentuk pengawasan dan kontrol sosial pada elemen lembaga pemerintahan di tingkat desa. Hingga akan terbentuk mekanisme keberhasilan dalam mengatasi berbagai konflik sosial di lingkungan masyarakat.

Maka dari itu perlu adanya resolusi konflik yang perlu dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan atau memberikan pendidikan dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi. Berikut salah satu bentuk resolusi konflik sosial yang bisa dilakukan berdasarkan hasil penelitian Sagaf S. Pettalongi (2013) yakni melalui peran pendidikan humanis yang berorientasi pada keseimbangan dalam kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual harus diterapkan salah satunya melalui implementasi pendidikan multikultural dan pendidikan karakter. Pendidikan humanis yang berorientasi pada nilai-nilai dasar ideologi Pancasila akan menjadi kunci dalam upaya membangun peradaban masyarakat Indonesia yang terhindar dari berbagai konflik sosial. Dengan demikian konsep agama Islam dan pendidikan humanis apabila dapat dikembangkan dan diterapkan dengan baik diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmoni yang terjadi di dalam masyarakat sebagai efek dari kemajemukan

dan pluralitas masyarakat Indonesia. Konsep resolusi konflik sosial juga harus dikembangkan atau ditanamkan pada proses pembelajaran di kelas yang berorientasi pada nilai-nilai dasar ketuhanan. Hasil penelitian Supriyanto Pasir (2013) menunjukkan bahwa, dengan menggunakan metode analisis tematik ditemukan setidaknya dua belas kegiatan resolusi konflik dan nilai-nilai dalam al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai pendidikan resolusi konflik, yaitu: . 1) Saling mmenahan diri dan mmemaafkan, 2) Berkomunikasi secara bijak, Memberi nasihat yang baik dan berdebat yang konstruktif-argumentatif, 3) Masing-masing pihak menahan diri, Tetap Berbuat Baik dan Menghargai Mereka yang Berbeda, 4) Saling Memberi Pengertian Kepada Masing-masing Kelompoknya Tentang Pentingnya Pengetahuan, 5) Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, 6) Membuka Jaringan Persaudaraan dengan Seluruh Komunitas yang Ada, 7) Mendorong Terwujudnya Perdamaian, 8) Mengajak Pihak-pihak yang Berkonflik Kembali kepada Kitab Allah, 9) Mengajak Semua Pihak Menjauhi Prasangka, Tajassus dan Gibah, 10) Menghindari Sikap Merendahkan Pihak Lain, 11) Membuktikan dengan Berlomba-lomba Mewujudkan Ke-baik-an. 12) Perang dalam Perspektif al-Qur'an.

Bentuk lain yang juga bisa dilakukan dalam resolusi konflik sosial yakni melalui pendidikan resolusi konflik berbasis budaya. mengutip pendapatnya Elly Malihah (2011, 3) program pendidikan resolusi konflik berbasis budaya adalah suatu program yang mendidik para siswa atau mahasiswa juga masyarakat luas untuk memahami konflik budaya dengan lebih baik, mampu mengendalikan emosi dan mempunyai keterampilan untuk memecahkan konflik secara konstruktif. Pendidikan resolusi konflik berbasis budaya harus sejalan dengan pengembangan kecerdasan emosional yang memainkan peranan penting dalam pengembangan nilai dasar kepribadian peserta didik yang terpadu, dan masyarakat umumnya dengan pendekatan

andragogi. Konsep resolusi konflik berbasis budaya memberikan pembekalan bahwa karakter kepribadian manusia harus dikembangkan melalui pendalaman nilai-nilai dasar kearifan lokal dan berwawasan global dalam rangka pengukuhan wawasan kebangsaan warga negara global dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi.

Dengan demikian perlu adanya konsep manajemen konflik sosial yang perlu dilakukan agar setiap konflik sosial bisa diselesaikan bisa diselesaikan, dalam hal ini I Wayan Rai (2011: 8) memberikan lima langkah dalam manajemen konflik sosial diantaranya ialah 1) keberadaan objek konflik yang telah terjadi di masa lampau, sedang terjadi, dan bahkan potensi-potensi konflik yang akan terjadi; 2) pihak-pihak yang telah dan sedang bertikai, dinamika konflik yang telah dan sedang terjadi (laten atau manifest) dan faktor-faktor atau sumber-sumber yang dapat memicu konflik laten menjadi manifest, 4) pihak-pihak yang dapat dilibatkan baik sebagai mediator maupun negosiator sehingga konflik dapat dikonsolidasikan dengan damai dan, 5) kondisi-kondisi pasca konflik. Salah satu bentuk pengimplementasian manajemen konflik sosial yang bisa dikembangkan yakni melalui konsep pendidikan kewarganegaraan global. Pendidikan kewarganegaraan global memberikan dasar ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat. secara global dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi dan berlandaskan pada dasar nilai-nilai filosofis bangsa negara Indonesia dalam menghadapi dinamika globalisasi teknologi dan informasi yang menimbulkan konflik sosial di kalangan masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan global dapat membangun konsep warga negara global dalam menyelesaikan konflik sosial apabila proses pembelajaran yang dilakukan per orientasi pada pengembangan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, konflik dan isu-isu global berbasis

pendidikan otentik dengan penerapan strategi, pendekatan dan model pembelajaran yang terintegrasi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai dasar proses pembelajaran pada Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun karakter warga negara global yang baik cerdas dan dapat diandalkan.

Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial

Konflik sosial yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi dan informasi di era global tentu tidak bisa untuk dihindari, hingga perlu adanya peran serta lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal dalam mengembangkan keilmuan pada penanaman nilai-nilai pendidikan resolusi konflik berwawasan global. Pendidikan kewarganegaraan global merupakan konsep pembelajaran di era global yang perlu dikembangkan pada setiap proses pembelajaran di sekolah. Implementasi pendidikan kewarganegaraan global sebagai resolusi konflik sosial memiliki tiga indikator dasar yang meliputi tanggung jawab sosial, kompetensi global dan keterlibatan masyarakat secara global (Duarte B. Morais & Anthony C. Ogden, 2011). Ketiga indikator tersebut diaktualisasikan dalam konsep pendidikan kewarganegaraan global sebagai resolusi konflik sosial yang akan dikembangkan dengan dasar nilai-nilai filosofi bangsa yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kompetisi, menghormati orang lain, kemerdekaan, perdamaian. (Murdiono, 2014: 356). Nilai-nilai ini perlu dikembangkan dalam upaya resolusi konflik sosial akibat dari pengaruh perkembangan teknologi dan informasi di era global. Terdapat beberapa konsep yang bisa dilakukan dalam upaya mengembangkan proses pendidikan kewarganegaraan global sebagai resolusi konflik sosial.

Pertama, pembelajaran pendidikan resolusi konflik berbasis online MOOCs. Konsep ini merupakan pengembangan dari indikator kompetensi global dalam

pendidikan resolusi konflik. Bentuk pembelajaran online merupakan solusi bagi seluruh warga negara dunia dalam memahami berbagai permasalahan global yang terjadi. Media Internet tentu tidak asing bagi seluruh warga negara dunia saat ini. kebutuhan internet sudah menjadi bagi kebutuhan pokok untuk diperoleh setiap hari. Warga negara dunia harus turut ambil bagian dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang di jamin oleh setiap negara. bentuk pembelajaran online yang bisa dilakukan dengan menggunakan program *massive online open courses* (MOOCs). MOOCs merupakan salah satu program yang berbasis online dalam menyampaikan proses pembelajaran bagi seluruh warga negara khususnya pada peserta didik di lingkungan sekolah. Untuk menjalankan program MOOCs tentu harus dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan secara bertahap selayaknya proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Bentuk belajar online yang diajarkan dengan bentuk pemahaman negosiasi antar setiap komponen dalam proses belajar online. Salah satu munculnya program MOOCs juga didasari adanya berbagai konflik yang terjadi di seluruh dunia. melalui program ini diajak untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan global untuk di cari solusi agar bisa di selesaikan dan pesatnya juga terdiri dari berbagai pelajar di dunia karena menggunakan program online dengan menggunakan internet. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk membentuk watak dan karakter warga negara dunia agar bersama-sama untuk berkontribusi dalam menyelesaikan resolusi konflik yang terjadi dengan konsep dasar negosiasi melalui pembelajaran online. Bentuk pembelajaran ini bisa dikembangkan di lingkungan sekolah dengan konsep terintegrasi dengan proses pembelajaran di sekolah. Untuk ke depannya MOOCs berfokus pada negosiasi dan resolusi konflik menawarkan alat untuk memajukan misi menyebarluaskan pengetahuan negosiasi dan keterampilan pada masyarakat luas. Karena mereka dapat menjangkau lebih banyak orang dengan

jauh lebih sedikit hambatan untuk berpartisipasi. Melalui pembelajaran online MOOCs dapat membantu bangkit untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang negosiasi yang efektif (Noam Ebner, 2016). Konsep pembelajaran online ini tentu juga efektif untuk mengontrol adanya penyebaran berita-berita hoax yang akan memunculkan adanya konflik sosial, sehingga masyarakat akan lebih paham dan hati-hati dalam menyingkapi sebuah berita yang beredar di kalangan masyarakat melalui media.

Kedua, pendidikan perdamaian berbasis sekolah. Konsep pendidikan perdamaian berbasis sekolah merupakan pengembangan dari indikator tanggung jawab sosial. Menurut Johnson and Johnson & Johnson (2006), pendidikan perdamaian adalah jenis pendidikan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan pembentukan hubungan yang harmonis dan penyelesaian konflik dalam a cara yang konstruktif. Sebagaimana yang disampaikan Sommers (2003), pendidikan perdamaian membantu mengembangkan keterampilan komunikasi mendengarkan aktif dan pidato asertif, keterampilan pemecahan masalah brainstorming atau membangun konsensus, dan keterampilan orientasi kesadaran budaya dan empati. Melalui pendidikan perdamaian, siswa dapat mengenali pemahaman diri dan manajemen di samping faktor eksternal sebagai domain dari pengaruh mereka terhadap perdamaian pengembangan. Mereka belajar bahwa keadaan interpersonal dan lingkungan adalah hasil interaksi dengan proses internal dan eksternal. Meluasnya topik konflik di setiap mata pelajaran sekolah, serta selama interaksi di sekolah, memberikan konteks yang luas untuk pendidikan perdamaian (Carter, 2008).

Pendidikan perdamaian berbasis sekolah merupakan bentuk pembelajaran kolaborasi antara pendidikan resolusi konflik dan pendidikan hak asasi manusia. Dimana peserta didik ditempatkan pada posisi penyelesaian konflik sosial secara

global sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dalam menyelesaikan permasalahan global yang berdasar pada nilai-nilai filosofis bangsa. Pendidikan resolusi konflik memiliki empat tujuan yang bersifat universal salah satunya adalah (1) Ciptakan lingkungan belajar yang aman, (2) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang konstruktif, (3) Meningkatkan perkembangan sosial dan emosional siswa, (4) Buat komunitas konflik yang konstruktif. Pendidikan resolusi konflik menjadi satu bentuk kesatuan dengan program pendidikan hak asasi manusia yang tentu sudah lebih dahulu di terapkan di berbagai belahan dunia (Tricia S. Jones, 2006). Konsep pendidikan hak asasi manusia merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan nilai dasar kemanusiaan. Dalam praktiknya pendidikan hak asasi manusia mengajarkan tentang lima nilai dasar dalam kehidupan yang terdiri dari (1) mengajarkan tentang dan untuk hak asasi manusia: (2) pendidikan sebagai hak asasi manusia itu sendiri, (3) hak asasi manusia dalam pendidikan; (4) pendidikan dan pelatihan para profesional yang dihadapkan dengan masalah hak asasi manusia: (5) aspek kerja pendidikan dan sosial dari hak anak (Lenhart & Savolainen, 2002). Terdapat tiga cara dalam mengkalibrasikan pendidikan resolusi konflik dengan pendidikan hak asasi manusia diantaranya adalah 1) Pilih Kurikulum dengan konten hak asasi manusia, 2) Jelajahi program peradilan restorative untuk sekolah, 3) Pertimbangkan kekuatan kerangka hak asasi manusia. (Tricia S. Jones, 2006). Tanggung jawab sosial dalam pendidikan perdamaian berbasis sekolah memberikan ruang bagi peserta didik dalam menganalisis berbagai persoalan konflik sosial pada masyarakat untuk diselesaikan secara sistematis dalam bentuk kegiatan proyek perdamaian sehingga peserta didik akan dibekali ilmu dasar antara pendidikan resolusi konflik dan pendidikan hak asasi manusia dalam upaya penyelesaian konflik sosial.

Ketiga, mediasi sebaya sebagai bentuk resolusi konflik sosial. mediasi sebaya merupakan pengembangan dari indikator keterlibatan masyarakat secara global. Mediasi adalah proses membantu dua orang atau lebih untuk menyelesaikan konflik mereka dengan cara yang konstruktif oleh pihak ketiga yang tidak biasa. Mediasi adalah satu langkah di depan proses negosiasi dan merupakan strategi yang membuat negosiasi lebih efektif dan efisien (Johnson & Johnson, 1995). Ketika proses ini dilakukan oleh seorang rekan di sekolah, itu disebut mediasi sebaya. Mediasi teman sebaya adalah proses yang membantu siswa untuk menyelesaikannya konflik dengan cara yang konstruktif dan damai sambil mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka (Turnuklu, 2006: 70). Program-program ini memberikan kesempatan unik bagi beragam siswa untuk digunakan komunikasi, hubungan manusia, dan keterampilan memecahkan masalah dalam pengaturan kehidupan nyata. Program yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah, meningkatkan hubungan interpersonal dan antar kelompok, dan membantu dalam mengurangi konflik sekolah dan kekerasan, terutama ketika bagian dari rencana pencegahan kekerasan yang komprehensif (2007: 2). Mediasi teman sebaya adalah pendidikan resolusi konflik yang tertua dan paling umum intervensi (Cohen, 2003). Dengan kata lain, mediasi teman sebaya adalah jenis pendidikan resolusi konflik di mana penekanannya adalah dalam memberikan keterampilan mediasi. Berdasarkan hasil penelitian Fulya Turk (2018) menjelaskan bahwa efek resolusi konflik, pendidikan perdamaian dan pendidikan mediasi sebaya pada konflik keterampilan resolusi siswa telah diperiksa dengan cara metode meta-analisis. Dengan demikian, konflik Resolusi, pendidikan perdamaian dan program pendidikan mediasi sebaya memiliki berbagai efek pada konflik keterampilan resolusi siswa. sehingga dapat diartikan bahwa mediasi

sebaya mampu memberikan dampak lebih signifikan dalam penyelesaian konflik sosial di era perkembangan teknologi dan informasi mengingat bahwa perkembangan teknologi dan informasi didominasi oleh generasi muda yang memiliki tingkat individualisme tinggi hingga perlu adanya pendekatan secara personal dalam menyelesaikan setiap permasalahan konflik sosial.

SIMPULAN

Konflik sosial di era global dipicu selain dari adanya perbedaan kebiasaan, nilai dan norma sosial yang dianut oleh masing-masing orang atau kelompok juga cenderung diakibatkan dari perkembangan teknologi dan informasi. Konsep pendidikan kewarganegaraan global dapat digunakan sebagai media untuk mentransformasikan dimensi wawasan global dalam penyelesaian berbagai konflik sosial, yang terdiri dari tanggung jawab sosial, kompetensi global dan keterlibatan masyarakat secara global. adapun model pendekatan yang bisa dilakukan melalui pendekatan pembelajaran pendidikan resolusi konflik berbasis online, pendidikan perdamaian berbasis sekolah, mediasi sebaya sebagai bentuk resolusi konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbaria, A. K. (2011). "The Social Studies Education Discourse Community on Globalization: Exploring The Agenda of Preparing For The Global Age". *Journal of Studies in International Education*, 15 (1), hlm. 57-74.
- Association for Conflict Resolution. (2007). *Standars for school-based peer mediation programs*. Washington, D.C.: Association for Conflict Resolution.
- Bourke, L., Bamber, P., dan Lyons, M. (2012). "Global Citizens: Who Are

- They??. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7 (2), hlm. 161-174
- Carter, C. C. (2008) Voluntary standards for peace education. *Journal of Peace Education*, 5(2), pp. 141-155. <https://doi.org/10.1080/17400200802264347>
- Cogan, I. J. (1999). *Developing the Civil Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CICED
- Cohen, R. (2003). Students Helping Students: Peer Mediation. In T. Jones, & R. Compton (Eds.), *Kids Working It Out: Stories and Strategies for Making Peace in Our Schools*. San Francisco: Jossey-Bass.
- David Kerr. (1999). *Citizenship Education: an International Comparison*. Enggland: National Foundation for Educational Research (NER)
- Dill Jefferey, S. (2012). The Moral Education of Global Citizenship. *Global Society*. pp. 541-456. DOI: 10.1007/s12115-012-9599-8.
- Duarte B. Morais & Anthony C. Ogden. (2011). Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale. *Journal of Studies in International Education*. 15(5). pp. 445-466
- Elly Malihah. (2011). Membangun Kesepahaman Budaya Indonesia Dan Malaysia Menuju Masyarakat Berwawasan Global. (2011): *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1(1). pp. 1-6.
- Fulya Turk. (2018). Evaluation of the Effects of Conflict Resolution, Peace Education and Peer Mediation: A Meta-Analysis Study. *International Education Studies*, 11(1), pp. 26-43. DOI: 10.5539/ies.v11n1p25
- Guruppkn.com*. (2016). Retrival November 08, 2018, from <https://guruppkn.com/contoh-konflik-sosial-dalam-masyarakat>
- I Wayan Rai. (2011). Manajemen Konflik Sosial Sebagai Prakondisi Dalam Pelayanan Ipteks Bagi Masyarakat. *Jurnal Ngayah*, 2(2), pp. 2-11
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2006). Peace education for consensual peace: the essential role of conflict resolution. *Journal of Peace Education*, 3(2), pp. 147-174. DOI: <https://doi.org/10.1080/17400200600874792>
- Johnson, W. D., & Johnson, T. R. (1995). *Teaching Students To Be Peacemakers*. Edina, MN: Interaction Book Co.
- Jurdi, Syarifuddin. (2010). *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Lenhart, V. & Savolainen, K. (2002) Human rights education as a field of practice and of theoretical reflection. *International Review of Education*, 48(3/4), pp. 145–158.
- Liputan6.com*. (2018). Retrival November 08, 2018, from <https://www.liputan6.com/news/read/3502366/wapres-jk-dampak-negatif-teknologi-hoax-berujung-konflik-sosial>
- Mukhamad Murdiono. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, XXXIII(3), pp. 349-357 DOI:<http://dx.doi.org/10.21831/cp.v3i3.2379>

- Noam Ebner. (2016). Negotiation and Conflict Resolution Education in the Age of the MOOC. *Negotiation Journal; Oxford*, 32(3), pp. 231-260. DOI: 10.1111/nej.12156
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*.
- Sagaf S. Pettalongi. (2013). Islam dan Pendidikan Humanis dalam Resolusi Konflik Sosial. *Cakrawala Pendidikan*, 2(2013), pp. 172-183. DOI:<http://dx.doi.org/10.21831/cp.v0i2.1474>
- Shahla Zahabioun, Alireza Yousefy, Mohammad H Yarmohammadian & Narges Keshtiaray. (2013). Global Citizenship Education and Its Implications for Curriculum Goals at the Age of Globalization. *International Education Studies*. pp.195-206. DOI: 10.5539/ies.v6n1p195
- Sommers, M. (2003). Peace Education: Opportunities and Challenges. Presentation at essential role of conflict resolution. *Journal of Peace Education*, 3(2), pp. 147-174.
- Supriyanto Pasir. (2013). Pendidikan Resolusi Konflik Berbasis al-Qur'an. *Nadwa / Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), pp. 181-210. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/nw.2013.7.2.5>
- Sutrisno. (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), pp. DOI: <http://doi.org/10.25273/citizenship.v6i1.1880>
- Tricia S. Jones. (2006). Combining conflict resolution education and human rights education: thoughts for school-based peace education. *Journal of Peace Education*, 3(2), pp. 187-208. DOI: 10.1080/17400200600874826
- Turnuklu, A. (2006). *Sınıf ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin*. Ankara: Ekinoks